

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELUARAN KAS DI BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MANADO**

Oleh

Juan Hulio Eltberph Senduk

NIM : 21 043 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELUARAN KAS DI BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MANADO
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
Pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan**

Oleh:

Juan Hulio Eltberph Senduk

NIM. 21 043 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELUARAN KAS DI BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MANADO**

Oleh

Nama : Juan Hulio Eltberph Senduk
NIM : 21043004
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk Diuji

Manado, Juli 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Merry Ligia Sael, SE.,MAP
NIP.197303252008122001



Grace Ropa, SE.,Msi
NIP.196407261993032001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELUARAN KAS DI BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MANADO**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 09.00 – 11.00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

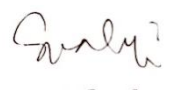
Juan Hulio Eltberph Senduk

NIM, 21 043 004

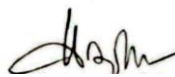
Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji :	Stevie Kaligis, SE.,MM.Ak NIP. 197204152002121000	
Penguji I :	Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc. NIP. 199403152022032013	
Penguji II :	Dra. Anneke Marie Kaunang, M.Pd NIP. 196610081993032002	

Koordinator program studi
Jurusan akutansi keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

Ketua Jurusan



Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA
NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Juli 2025

Penulis

Juan Hulio Eltberph Senduk

NIM 21 043 004

ABSTRAK

Juan Hulio Eltberph Senduk, 2025. Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengeluaran Kas Dibadan Keuangan Dan Aset Daerah Kota manado skripsi. Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Merry Ligia Sael, SE.,MAP dan Pembimbing II: Grace Ropa, SE.,Msi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem pengendalian internal yang efektif dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada proses pengeluaran kas di BKAD Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado, khususnya pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan dalam proses pengeluaran kas..

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal di BKAD Kota Manado telah mengimplementasikan unsur-unsur penting seperti pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumentasi yang memadai, serta pemantauan internal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia. kurangnya pemahaman SKPD dan Kesalahan sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal sudah berjalan cukup baik, diperlukan penguatan dalam aspek teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pengeluaran kas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan daerah yang lebih optimal serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas, SP2D, BKAD

ABSTRACT

Juan Húlio Eltberph Senduk, 2025.. ***analysis of the Internal Control System on Cash Disbursement at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Manado City.***
Undergraduate Applied Accounting Program, Department of Accounting, Manado State Polytechnic. Supervised by Advisor I: Merry Ligia Sael, SE., MAP and Advisor II: Grace Ropa, SE., MSi.

This study is motivated by the importance of an effective internal control system in supporting accountability and transparency in regional financial management, particularly in the cash disbursement process at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Manado City. This study aims to analyze the internal control system for cash disbursements at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Manado City, particularly in the process of issuing the Warrant for Fund Disbursement (SP2D). Accountable and transparent regional financial management serves as a fundamental basis for realizing good governance. An effective internal control system is necessary to prevent irregularities, fraud, and errors in the cash disbursement process..

The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The study found that the internal control system at BKAD Manado has implemented essential elements such as segregation of duties, transaction authorization, adequate documentation, and internal monitoring. However, several challenges remain, including limited human resources, lack of understanding among SKPD (regional work units), and system errors..

The results indicate that although the internal control system is operating fairly well, enhancements in information technology and capacity building for human resources are needed to improve the effectiveness, efficiency, and accountability of cash disbursement management. This research is expected to contribute to the development of a more optimal regional financial system and serve as a reference for future similar studies..

Keywords: *Internal Control System, Cash Disbursement, SP2D, BKAD,*

RIWAYAT HIDUP

Nama : Juan Hulio Eltberph Senduk
Nim : 21043004
Tempat/Tanggal Lahir : Modayag, 24 Juli 2003
Agama : Kristen Protestan
Alamat Email : J.Senduk24@Gmail.Com
Riwayat Pendidikan : Tk Cahaya kasih
: -SD Negeri 1 Modayag
: -SD Advent Paal Dua
: -SD Negeri Inpres Kolongan
: SMP Negeri 2 Kalawat
: SMK Negeri 1 Airmadidi
Alamat : Perumahan Risky Blok E Nomor 6
Orang Tua
Ayah : Vons Ferry Senduk
Ibu : Mareike Elsy Datu

MOTTO

‘Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan’

(Yeremia 29:11)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan menolong saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tak pernah putus. Kasih sayang serta pengorbanan yang mereka berikan menjadi sumber motivasi utama dalam menyelesaikan skripsi

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Manado, khususnya kepada para dosen, staf, serta pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan fasilitas yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Segala arahan dan ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis.

Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang telah dilakukan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semua tantangan dan rintangan yang berhasil dilewati menjadi pengalaman berharga untuk melangkah ke jenjang berikutnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai upaya untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada proses pengeluaran kas di BKAD Kota Manado. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan wawasan akademis maupun sebagai bahan pertimbangan praktis bagi pihak terkait untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian internal yang telah diterapkan.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot, SE.,MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.

12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Merry Ligia Sael, SE.,Msi selaku Dosen Pembimbing 1
18. Grace Ropa, SE.,Msi selaku Dosen Pembimbing 2
19. Stevie Kaligis, SE.,MM.Ak selaku ketua penguji
20. Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc. Selaku Dosen Penguji 1
21. Dra. Anneke Marie Kaunang, M.Pd Selaku Dosen Penguji 2
22. Esrie Alfian Nixon Limpeleh, SE., MM selaku Dosen Wali.
23. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
24. Keluarga yang selalu memberikan semangat serta doa.
25. Teman teman kelas D4 akuntansi keuangan Angkatan 2021.
26. Kepala Badan, Sekretaris Badan, Bpk Kabid Perbendaharaan, Ibu Kasub, Bpk Kasub, Pak vany, Pak oldri, Pak vian, Ibu Treis, Ibu Agustin, Ibu Masye, Ibu Cherry, Ibu Ivone, Ka Yona, Ka Ela, Ka Endru, Ka Edis, Ka Yulit, Ka Lisa serta Seluruh Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Juli 2025

Juan Hulio Eltberph Senduk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008	8
2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal pemerintah	8
2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal pemerintah	8
2.1.3 Unsur Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	8
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	10
2.2.1 Pengertian.....	10
2.2.2 Tujuan.....	11
2.3 Kas	12
2.3.1 pengertian.....	12
2.4 Pengendalian Internal Pengeluaran Kas	12

2.4.1 Pengertian.....	12
2.4.2 unsur unsur	13
2.5 Penelitian Terdahulu	14
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.3 Sumber Data	19
1.Data Primer	19
2.Data Sekunder	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data	19
1.Observasi	19
2.Wawancara	19
3.Dokumentasi	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado	22
4.1.1 Sejarah Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Manado	22
4.1.2 Struktur Organisasi	23
4.2 Hasil Penelitian	26
4.2.1 Bagian Bagian Terkait.....	27
4.2.2 Dokumen Dokumen Terkait	28
4.2.3 Flowchart.....	28
4.2.4 Prosedur Penerbitan SP2D Di BKAD Kota Manado	32
4.3 Pembahasan	33
4.3.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	33
4.3.2 Analisis Temuan Penelitian	37
4.3.3 Implikasi Penelitian	38
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	40
5.1Kesimpulan.....	40
5.2Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4. 1 Matriks SPIP	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 Kerangka Berpikir	17
Gambar 3 Struktur Organisasi	24
Gambar 4 Flowchart Data Olahan.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	44
Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin	45
Lampiran 3 Konsultasi Dosen Pembimbing 1	45
Lampiran 4 Konsultasi Dosen Pembimbing 2	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan merupakan elemen vital dalam kehidupan bernegara yang memiliki peran sentral dalam pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat. Sebagai institusi yang berwenang dalam merumuskan kebijakan, mengatur kehidupan sosial, dan menjalankan hukum, Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan publik, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai pengawas untuk memastikan terciptanya keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta keseimbangan sosial yang berkelanjutan. dalam konteks ini, pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik, ekonomi, serta perkembangan sosial budaya yang terus berubah seiring waktu. Seiring dengan perkembangan waktu, berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat menyebabkan pemerintahan harus lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam memastikan pemerintah mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Penelitian mengenai pemerintahan menjadi sangat relevan mengingat adanya berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan dalam pelayanan publik, serta ketidakmampuan sistem pemerintahan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul di era globalisasi. Di samping itu, muncul pula pertanyaan terkait sejauh mana sistem pemerintahan yang berlaku dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta asas-asas *good governance*, khususnya di tengah tantangan dan tekanan sosial maupun politik yang kompleks.

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tercapainya tujuan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien agar mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian daerah. Seiring dengan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu keharusan. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, dan efektif.”(Daerah., 2006)

Sistem pengendalian dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yang berjalan secara efektif. Pengendalian internal adalah serangkaian proses yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen bersama dewan direksi suatu organisasi, yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal berperan sebagai alat untuk mendeteksi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, sekaligus mengurangi potensi kecurangan, kesalahan, atau penyimpangan yang merugikan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan serta aset milik daerah. Fungsi utama dari BKAD adalah untuk mengelola anggaran daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran, serta mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, guna memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan dan aset tersebut dikelola secara efisien, efektif, dan transparan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan dan aset yang efektif memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, sistem keuangan

dan pengelolaan aset daerah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan terkait pengelolaan aset daerah.

Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado mencakup beberapa bidang utama, yaitu Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Aset. Fokus penelitian ini adalah pada Bidang Perbendaharaan, yang memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan penatausahaan keuangan daerah, termasuk proses rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Proses ini dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) memiliki peran penting sebagai instrumen pembayaran resmi, yang bertujuan untuk menjamin pengelolaan sumber daya keuangan dan aset secara efisien, efektif, serta transparan. Menurut (Kamila Luthfia Yahya et al., 2023) Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang digunakan oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Perbendaharaan Daerah untuk melakukan pencairan dana lewat bank yang telah ditunjuk, setelah sebelumnya menerima Surat Perintah Membayar (SPM)(Nugraheni et al., 2024).

Prosedur penerbitan SP2D dimulai ketika BKAD Kota Manado menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD. Petugas BKAD kemudian memverifikasi kelengkapan dokumen SPM, memeriksa kesesuaiannya dengan dokumen pendukung, memastikan dana tersedia dalam PAD, dan memeriksa kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Setelah verifikasi selesai, petugas memasukkan data SPM ke dalam sistem keuangan daerah. Tahap berikutnya melibatkan proses persetujuan. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan, yang kemudian diikuti oleh persetujuan akhir dari Kepala BKAD untuk penerbitan SP2D. Setelah disetujui, petugas menerbitkan SP2D melalui sistem, mencetaknya, dan meminta tanda tangan dari pejabat yang berwenang. SP2D yang telah diterbitkan kemudian didistribusikan. Salinan SP2D dikirimkan ke SKPD terkait sebagai bukti pencairan dana, sementara SP2D asli diserahkan ke bank yang ditunjuk untuk proses pencairan dana. Petugas BKAD juga mencatat penerbitan SP2D dalam register SP2D dan buku kas umum.

Penelitian mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas dalam sektor publik ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian (Darmawan et al., 2023) “penelitian ini mengatakan bahwa Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah dirancang dengan cukup baik. Dalam sistem akuntansi penerimaan kas, fungsi-fungsi yang terlibat beserta dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah memadai untuk mendukung proses pencatatan yang akurat. Namun demikian, seiring dengan penerapan sistem non-tunai melalui aplikasi E-keuangan, muncul beberapa kendala, seperti keterbatasan akses jaringan internet yang belum merata di kalangan pengguna. Sementara itu, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, fungsi-fungsi terkait serta proses pencatatan juga telah berjalan sesuai dengan teori akuntansi, dengan didukung oleh dokumen bukti kas keluar dan dokumen pendukung lain yang relevan untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas pengeluaran kas”. Terdapat pula studi sejenis yang meneliti sistem pengendalian internal pengeluaran kas oleh (Sabu et al., 2023) “Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas yang diterapkan di Kantor Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Daerah., 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, unsur-unsur pengendalian intern di kantor tersebut juga dinilai memadai dan telah sejalan dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun demikian, masih terdapat kelemahan khususnya pada unsur lingkungan pengendalian, terutama dalam aspek penyusunan serta penerapan kebijakan yang mendukung pembinaan sumber daya manusia, dan juga pada bagian pengelolaan informasi yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan..”

Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara spesifik membahas permasalahan yang muncul di Kota Manado, khususnya terkait bidang perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Tantangan seperti kurangnya pemahaman SKPD terhadap kelengkapan berkas SPM, kurangnya kapasitas Sumber daya Manusia (SDM), sistem penginputan yang belum sepenuhnya optimal, melonjaknya permintaan SP2D pada hari tertentu, ketidaksinkronan antara server sistem keuangan daerah dengan sistem keuangan

nasional. Oleh karena itu, saya ingin meneliti hal tersebut dengan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di Kota Manado.

Pada penelitian yang akan dilakukan, terletak beberapa kebaharuan penelitian dalam studi pengelolaan keuangan daerah dengan menekankan pada sinkronisasi sistem keuangan daerah dengan sistem keuangan nasional serta analisis pengendalian internal pengeluaran kas terhadap SP2D di Kota Manado. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi pengendalian internal terkait pengeluaran kas, tetapi juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh BKAD Kota Manado, seperti keterbatasan SDM, dan kendala teknologi, serta menyampaikan saran perbaikan yang solutif guna meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.. Studi ini menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada Kota Manado, yang belum banyak diteliti dalam literatur sebelumnya, sehingga hasilnya dapat diaplikasikan pada pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas daerah secara lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini, dan hasilnya akan diuraikan secara mendalam dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini rumusan permasalahan utama yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado?
2. Bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran kas di BKAD Kota Manado?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus hanya membahas sistem pengendalian internal pengeluaran kas melalui proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado. Fokus penelitian terbatas pada pelaksanaan pengendalian internal di Bidang Perbendaharaan, yang memiliki tanggung jawab utama dalam proses penatausahaan kas daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di badan keuangan dan aset daerah kota manado
2. Mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran kas kota manado.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis
 - a) Memahami mekanisme sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado
 - b) Penulis dapat meningkatkan kemampuan analisis, kritis, dan metodologis penulis, yang bermanfaat untuk karier akademis atau profesional di masa depan.
2. Bagi Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Manado
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat membantu BKAD dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pengeluaran kas serta menawarkan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara praktis.
 - b) Mengidentifikasi kelemahan serta tantangan yang muncul selama proses pengeluaran kas.
 - c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Institusi

- a) Penelitian ini dapat meningkatkan citra Politeknik Negeri Manado sebagai institusi yang berkontribusi dalam penelitian akademis yang bermanfaat bagi pemerintahan daerah
- b) Dapat membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut antara Politeknik dan pemerintah dalam proyek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau program lainnya.
- c) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang relevan dalam kurikulum jurusan akuntansi, meliputi pengelolaan keuangan publik, sistem pengendalian internal.
- d) Penelitian ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dalam pengelolaan keuangan daerah atau sektor publik lainnya, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan karir di bidang akuntansi dan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal pemerintah

Sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. pelaksanaan dan pemantauan. penerapan pengendalian internal merupakan hal yang esensial untuk menjamin keberlangsungan operasional. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian atau pemborosan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Selain itu, pengendalian internal juga menyediakan informasi yang relevan untuk menilai kinerja perusahaan serta manajemen, dan memberikan data yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan strategis.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal pemerintah

Tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.1.3 Unsur Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi , Serta Pemantauan.

1.Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif; Intern dalam
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.Penilaian resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.: Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Identifikasi Risiko: mengidentifikasi kejadian atau kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.
- b) Analisis Risiko: untuk memahami sifat dan besarnya risiko, termasuk kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola.

3.Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memitigasi risiko, memastikan kebijakan dan prosedur telah dijalankan sesuai dengan tujuan. Kegiatan pengendalian harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi instansi pemerintah.

4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan (Monitoring)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pengambil keputusan, masyarakat, dan Lembaga.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dirancang untuk menciptakan keseragaman, konsistensi, dan komparabilitas dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Konseptualisasi SAP tidak hanya terbatas pada seperangkat aturan teknis, melainkan juga mencakup filosofi dasar yang melandasi pelaporan keuangan sektor publik. Ini meliputi pertimbangan atas akuntabilitas publik, transparansi, dan kebutuhan informasi bagi berbagai pemangku kepentingan.

Pengembangan SAP di Indonesia merupakan respons strategis terhadap tuntutan reformasi manajemen keuangan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans PP 71 Tahun 2010, kebutuhan akan adanya standar yang baku didorong oleh amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang disusun sesuai dengan SAP. Sebelum adopsi SAP yang seragam, praktik akuntansi pemerintah cenderung bervariasi dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles/GAAP*), sehingga menyulitkan proses konsolidasi, analisis, dan pengawasan keuangan negara. Oleh karena itu, kehadiran PP 71 Tahun 2010 merupakan tonggak penting dalam upaya modernisasi dan profesionalisasi akuntansi sektor publik di Indonesia, menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual parsial, dan kemudian sepenuhnya berbasis akrual.

2.2.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki tujuan-tujuan fundamental yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Tujuan-tujuan ini berorientasi pada penyediaan informasi keuangan yang berkualitas bagi para pengguna

1) Laporan: Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Salah satu tujuan utama SAP adalah untuk memungkinkan entitas pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan amanah secara transparan. SAP menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan, sehingga memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD

2) Meningkatkan Transparansi Informasi Keuangan

entitas pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya publik secara lebih baik.

- 3) Menyediakan Informasi yang Relevan untuk Pengambilan Keputusan menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pengambil keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Informasi yang relevan akan mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.
- 4) Meningkatkan Kualitas dan Keterbandingan Laporan Keuangan
SAP berperan sentral dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan memastikan konsistensi dalam perlakuan akuntansi atas transaksi dan peristiwa ekonomi. Standarisasi ini memungkinkan laporan keuangan dari entitas yang berbeda, atau laporan dari periode yang berbeda, untuk dapat dibandingkan secara bermakna (komparabel). Kualitas laporan keuangan yang tinggi, ditandai dengan keandalan, relevansi, dan daya banding, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan

2.3 Kas

2.3.1 Definisi Kas

Kas merupakan salah satu aset yang paling likuid dan penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kas didefinisikan sebagai uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam transaksi, termasuk uang kertas, koin, dan saldo rekening bank yang dapat ditarik kapan saja. Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pembayaran yang sangat likuid, yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi dan kegiatan Perusahaan

2.4 Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

2.4.1 Definisi Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield dalam karya mereka *Intermediate Accounting* mengemukakan bahwa pengeluaran kas merujuk pada aliran keluar uang tunai dari perusahaan yang dialokasikan untuk mendanai berbagai aktivitas operasional. Ini mencakup pembayaran utang, gaji karyawan, serta pembelian barang dan jasa. Oleh karena itu, pengelolaan pengeluaran kas yang efektif sangat penting untuk mempertahankan likuiditas Perusahaan

Pengendalian internal terhadap pengeluaran kas memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, setara dengan pengendalian penerimaan kas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa struktur pengeluaran uang berpengaruh langsung terhadap sumber dan jumlah penerimaan kas yang diperoleh.

2.4.2 unsur unsur

Unsur-unsur sistem pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem pengeluaran kas (Mulyadi, 2016):

1. Organisasi
 - a) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi
 - b) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan berwenang
 - a) Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang
 - b) Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
 - b) Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang
 - c) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap
3. Praktik yang Sehat
 - a) Saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya
 - b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap oleh Bagian Kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis mengacu pada lima penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas. Adapun kelima penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan & Perbedaan
² (Sabu et al., 2023)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan	Emba	Kualitatif Deskriptif	Pengendalian Intern Masih Kurang Pada Kebijakan Pembinaan Sdm Dan Informasi Sesuai Permendagri No. 60/2008	Sama Sama Membahas Pengendalian Interen, Tapi Belum Secara Khusus Membahas Bkad Kota Manado
(Darmawan et al., 2023)	Peranan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Mendukung Pengendalian Internal Kas Pada Badan Keuangan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sumatera Utara	Profit	Kualitatif Deskriptif	Pengendalian Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sudah Cukup Memadai	Lebih Berfokus Pada Penerimaan Kas

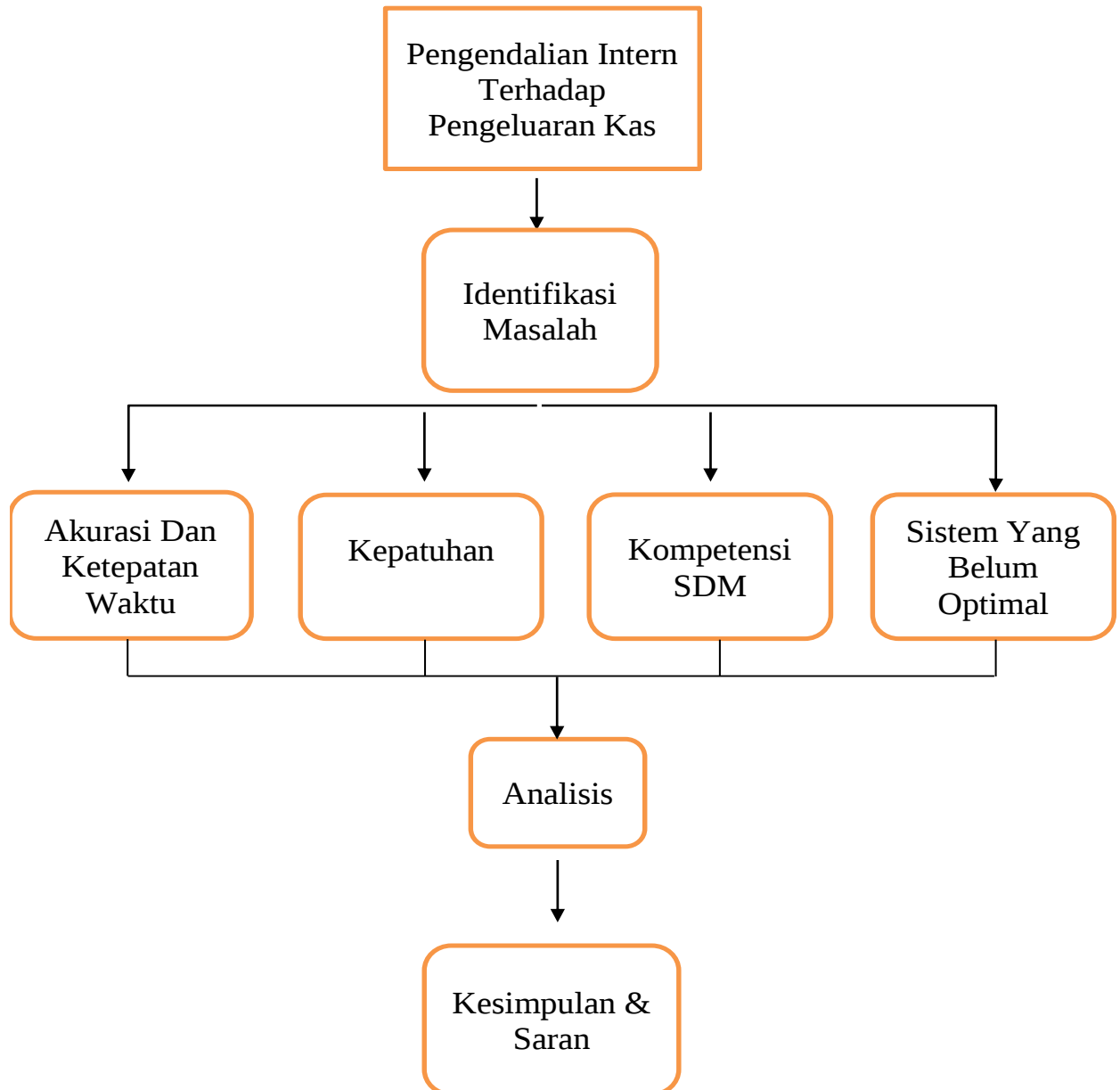
(Rachmawati & Ardini, 2023)	Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Pengeluaran Kas Pada Pt Surya Andalan Bumi Persada	Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi	Kualitatif	Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Pt Surya Andalan Bumi Persada Belum Berjalan Dengan Baik	Sama Sama Membahas pengendalian Interen Tapi Lebih Terfokus Pada Perusahaan Swasta
(Rajab, 2021)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kuantan Singingi	Juhanperak	Deskriptif Kualitatif	Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sudah Sesuai Dengan Kajian Teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.	Lebih Terfokus Pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
(Abdulah et al., 2023)	Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) Kota Tomohon	Emba	Deskriptif	Sistem Pengendalian Interen Sudah Efektif	Sama Sama Membahas Pengendalian Internal Tapi Berfokus Pada Bpkpd

Sumber penulis 2025

Berdasarkan kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua penelitian membahas aspek pengeluaran kas, serta pentingnya sistem sistem pengendalian intern. Namun, kelima penelitian diatas lebih fokus pada aspek lain seperti sistem akuntansi ,penerimaan kas kompetensi SDM, atau kendala dalam pelaksanaan pengendalian intern.

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber penulis 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti melakukan observasi serta terlibat langsung di lapangan selama proses penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku yang sedang diteliti. Penelitian ini sering digunakan dalam konteks di mana informasi langsung dari individu yang mengalami fenomena tersebut diperlukan, dan ketika waktu serta sumber daya terbatas. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mengungkap realitas sosial dan makna yang terkandung dalam berbagai masalah di masyarakat.

Menurut (Adlini et al., 2022) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan memahami realitas melalui proses penalaran induktif. dalam praktiknya, penulis secara aktif terlibat dalam konteks dan situasi fenomena yang diteliti, dengan fokus utama pada peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan. dengan fokus utama pada kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan.. Metode ini mengutamakan kelengkapan serta ketepatan data yang diperoleh, serta memastikan validitasnya melalui kesesuaian antara data yang dicatat dan kondisi aktual yang terjadi di lapangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang beralamat di Jl.Balai Kota No.1, Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari 2025 hingga Mei 2025. Rentang waktu tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian sekaligus menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis guna mendukung penyelesaian permasalahan penelitian. dalam penelitian ini didapatkan langsung dari pegawai yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. penulis melakukan wawancara dengan penanggung jawab terhadap proses pengendalian internal tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dimanfaatkan oleh penulis untuk membantu menjawab permasalahan yang sedang diteliti. dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur dan referensi, termasuk buku serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara teliti terhadap fenomena, objek, atau perilaku tertentu guna mendapatkan informasi yang faktual dan akurat. dalam observasi penulis melakukannya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado khususnya pada bidang perbendaharaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi atau interaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara penulis dan informan atau subjek penelitian. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan secara lisan, wawancara dilakukan dengan narasumber yang berada di Bidang Perbendaharaan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan dokumen yang tersedia.. Penulis mengumpulkan data melalui pengambilan data-data secara tertulis yang diperlukan dari dokumen yang telah di arsip atau melalui sistem yang berada di perusahaan yang berkaitan dengan penelitian

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah data hasil penelitian menjadi suatu informasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan dengan memaparkan, menjabarkan, serta menguraikan temuan analisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan. Adapun tahapan-tahapan dalam analisi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Data dikumpulkan secara langsung di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, khususnya di Bidang Perbendaharaan yang bertanggung jawab atas proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Teknik yang digunakan meliputi observasi terhadap prosedur penerbitan SP2D, wawancara dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengendalian internal dan proses verifikasi dokumen, serta dokumentasi berupa dokumen pendukung seperti SPM, SP2D. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu Januari – Mei sehingga penulis memperoleh data yang lengkap mengenai pelaksanaan pengendalian internal, hambatan yang dihadapi, dan praktik yang berjalan sehari-hari.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Seiring waktu pengumpulan data di BKAD Kota Manado, peneliti memperoleh beragam informasi mengenai mekanisme pengendalian internal, struktur organisasi, prosedur otorisasi, serta kendala teknis sistem. Pada tahap ini, peneliti menyaring dan merangkum data tersebut dengan fokus khusus pada aspek-aspek pengendalian internal yang terkait langsung dengan proses penerbitan SP2D. Hasil dari reduksi ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas,

memudahkan peneliti dalam tahap analisis selanjutnya, serta mempermudah penelusuran data kembali jika diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif mengenai sistem pengendalian internal pengeluaran kas di BKAD Kota Manado. Penyajian ini memuat hasil observasi prosedur penerbitan SP2D, uraian peran masing-masing bidang, hasil wawancara tentang efektivitas pengendalian, serta kendala yang ditemukan. Bentuk penyajian berupa uraian teks, tabel matriks evaluasi SPIP, serta flowchart proses penerbitan SP2D agar lebih mudah dipahami dan mendukung analisis lanjutan. Penyajian ini juga menjadi dasar untuk menarik kesimpulan akhir.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data dan temuan terkait implementasi sistem pengendalian internal pengeluaran kas di BKAD Kota Manado, khususnya di proses penerbitan SP2D. Kesimpulan ini mencakup efektivitas unsur-unsur SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan kembali ke lapangan dan konfirmasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan penelitian sesuai dengan kondisi nyata..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado

4.1.1 Sejarah Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Manado

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Manado Nomor 60 Tahun 2016, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peran utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, dalam prosesnya telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi. Berikut ini adalah rangkuman perkembangan kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam kurun waktu 2001–2008.

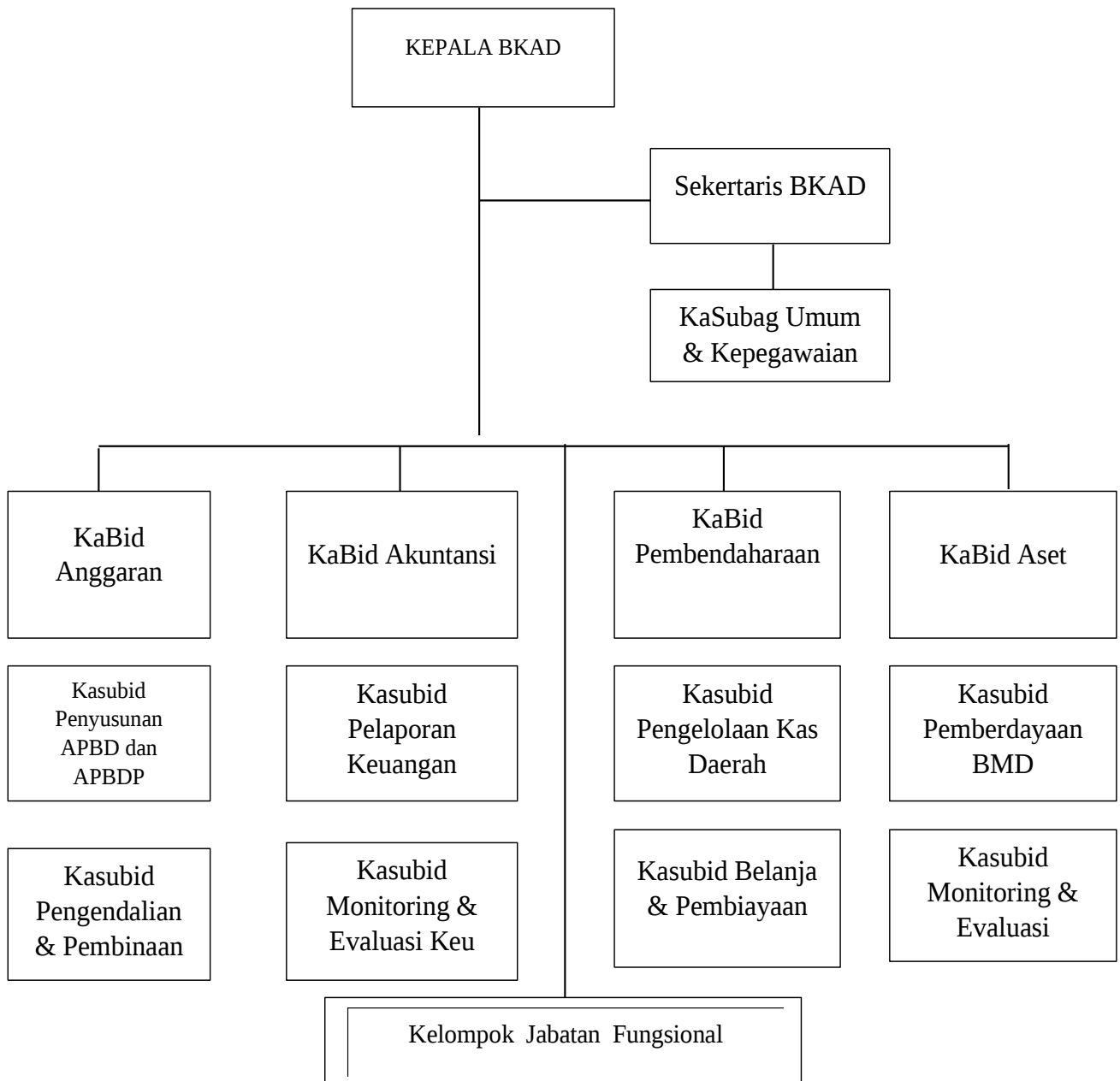
- a) Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Peraturan tersebut mengatur penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dengan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Pada masa itu, pengelolaan aset belum menjadi bagian dari struktur kelembagaan BPKD dan masih berada di bawah tanggung jawab Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah..
- b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA), yang beroperasi dari tahun 2009 hingga 2016, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pembentukan DPPKA merupakan hasil penggabungan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), sehingga tercipta satu kesatuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terintegrasi.

- c) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beroperasi pada periode 2017–2019 merupakan perangkat daerah yang terbentuk melalui penggabungan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan DPPKA. Pembentukan BPKAD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah. Sebagai peraturan pelaksana, diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, fungsi, tugas, serta tata kerja BPKAD.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado telah mengalami penyesuaian melalui penyederhanaan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional (JaFung), Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 8214/BKPSDM/SK/37/2021 tanggal 30 Desember 2021, berikut ini ditampilkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado untuk periode tahun 2022 - 2025.

Gambar 2 Struktur Organisasi



Sumber BKAD 2025

Berikut adalah uraian pekerjaan dari masing-masing Bidang :

1.Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado memiliki peran strategis dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta aset daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; selain itu, terdapat juga beberapa fungsi sebagai berikut

- a) Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis tersebut;
- b) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

2.Sekretariat

Sekretariat bertugas mendukung Kepala Badan dalam memberikan layanan teknis maupun administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKAD. Adapun fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi umum
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;

3. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas untuk membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan. Adapun fungsi yang dijalankan meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kekayaan maupun aktivitas operasional pemerintah daerah;

4.Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran bertugas mendukung Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi yang dijalankan oleh Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan dokumen perencanaan anggaran (RKA).
- b) Menyusun rancangan Perda dan Perwali tentang APBD dan perubahannya.
- c) Menyiapkan anggaran kas.
- d) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan anggaran kas..

5.Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan memiliki tugas utama dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas, serta seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Fungsi yang dijalankan oleh Bidang Perbendaharaan meliputi::

- a) Melaksanakan pengelolaan kas daerah secara efektif dan efisien.
- b) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen pembayaran.
- c) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah.

6.Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset bertugas dalam pengelolaan seluruh proses administratif dan teknis yang berkaitan dengan barang milik daerah, guna memastikan pengelolaan aset dapat berjalan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun fungsi yang dijalankan oleh Bidang Aset meliputi:

- a) Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris.
- b) Mengkoordinasikan proses pendataan, pengelolaan administrasi, pemanfaatan, perawatan, pengamanan, hingga penghapusan asset.
- c) Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap penggunaan serta pemanfaatan barang milik daerah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Hasil Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta aset milik daerah.. Aktivitas yang dilakukan oleh BKAD mencakup penyusunan rencana anggaran tahunan, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah, penyusunan laporan keuangan, dan pemantauan terhadap proses penerimaan dan pengeluaran kas.

4.2.1 Bagian Bagian Terkait

Proses pengeluaran kas pemerintah daerah melalui penerbitan SP2D, terdapat sejumlah bagian atau unit kerja yang memiliki peran strategis, baik dari sisi administratif, teknis, hingga pengawasan. Proses ini tidak dapat berjalan secara tunggal oleh satu bagian saja, tetapi melibatkan kerja sama antar bidang Untuk memastikan pengeluaran kas berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. beberapa diantaranya seperti :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pihak pengguna anggaran. menyusun dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk penerbitan surat perintah pencairan dana. Pada tahap ini, SKPD juga bertanggung jawab menyiapkan seluruh dokumen pendukung seperti faktur, kontrak, berita acara, serta bukti realisasi kegiatan.
- 2) Bidang perbendaharaan, Setelah SPM disusun, dokumen ini dikirim ke Bidang Perbendaharaan, yang menjadi pusat proses verifikasi. Petugas perbendaharaan akan meneliti kelengkapan dokumen SPM beserta lampirannya. Jika semua dokumen dianggap lengkap dan sah, data akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah seperti SITANGKAS atau aplikasi sejenis yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Bendahara Umum Daerah (BUD) bertugas mencairkan dana ke rekening tujuan sesuai yang tertera dalam SP2D. Dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak ketiga, penyedia barang dan jasa, atau ke kas SKPD untuk kegiatan tertentu.
- 3) Bidang Akuntansi, memiliki peran dalam mencatat setiap penerbitan SP2D ke dalam sistem akuntansi daerah. sangat penting sebagai landasan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah agar memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.2.2 Dokumen Dokumen Terkait

a) Surat Permintaan Pembayaran

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen resmi yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit pelaksana kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai permohonan untuk mencairkan dana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan jenis belanja yang akan dilaksanakan.

b) Surat Perintah Membayar (SPM)

Merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah, yang berfungsi sebagai instruksi atau perintah kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membayarkan sejumlah dana tertentu sesuai ketentuan yang berlaku

c) Dokumen pendukung transaksi

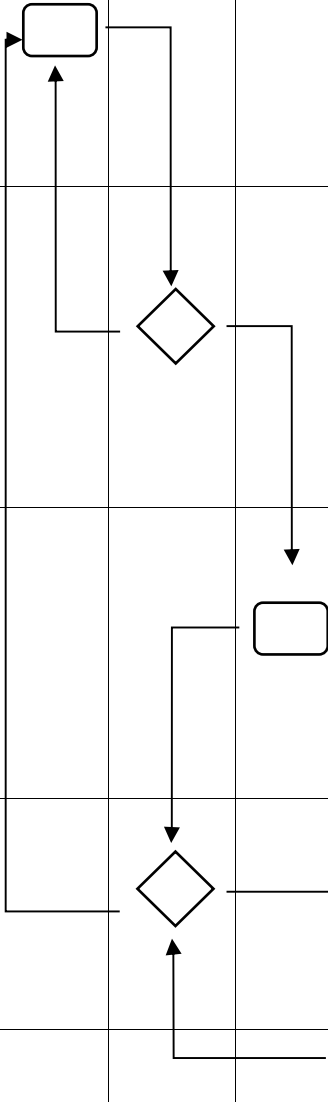
mencakup berbagai dokumen yang berfungsi sebagai bukti sah dan dasar hukum atas pengeluaran yang dilakukan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa kontrak kerja, faktur, kwitansi, nota pesanan, dokumen hasil pekerjaan, hingga bukti pemotongan pajak. Keseluruhan dokumen ini memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan persyaratan substantif, administratif, maupun formal yang ditetapkan.

d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

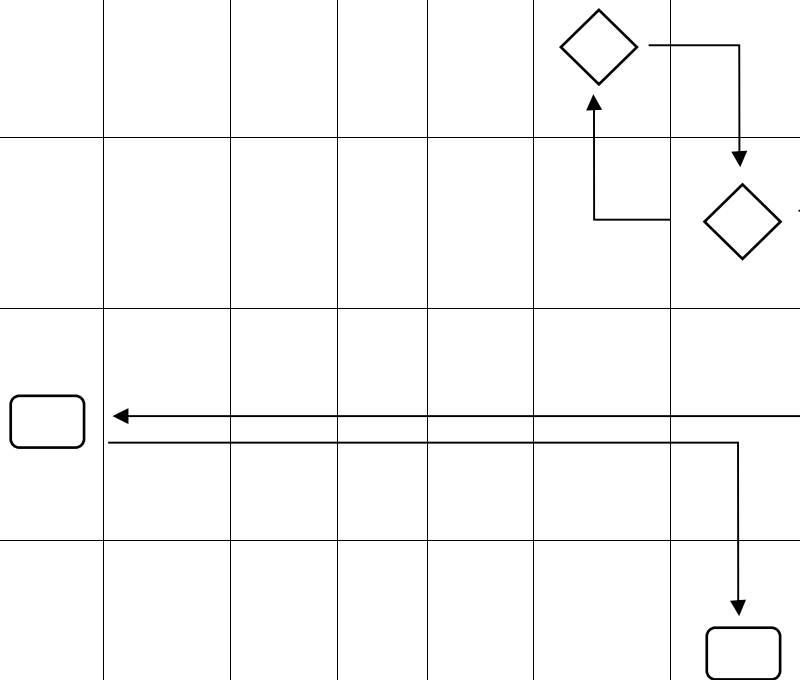
Merupakan dokumen formal yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), berisi perintah untuk mencairkan atau memindahkan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima.

4.2.3 Flowchart

1. Flowchart data perusahaan

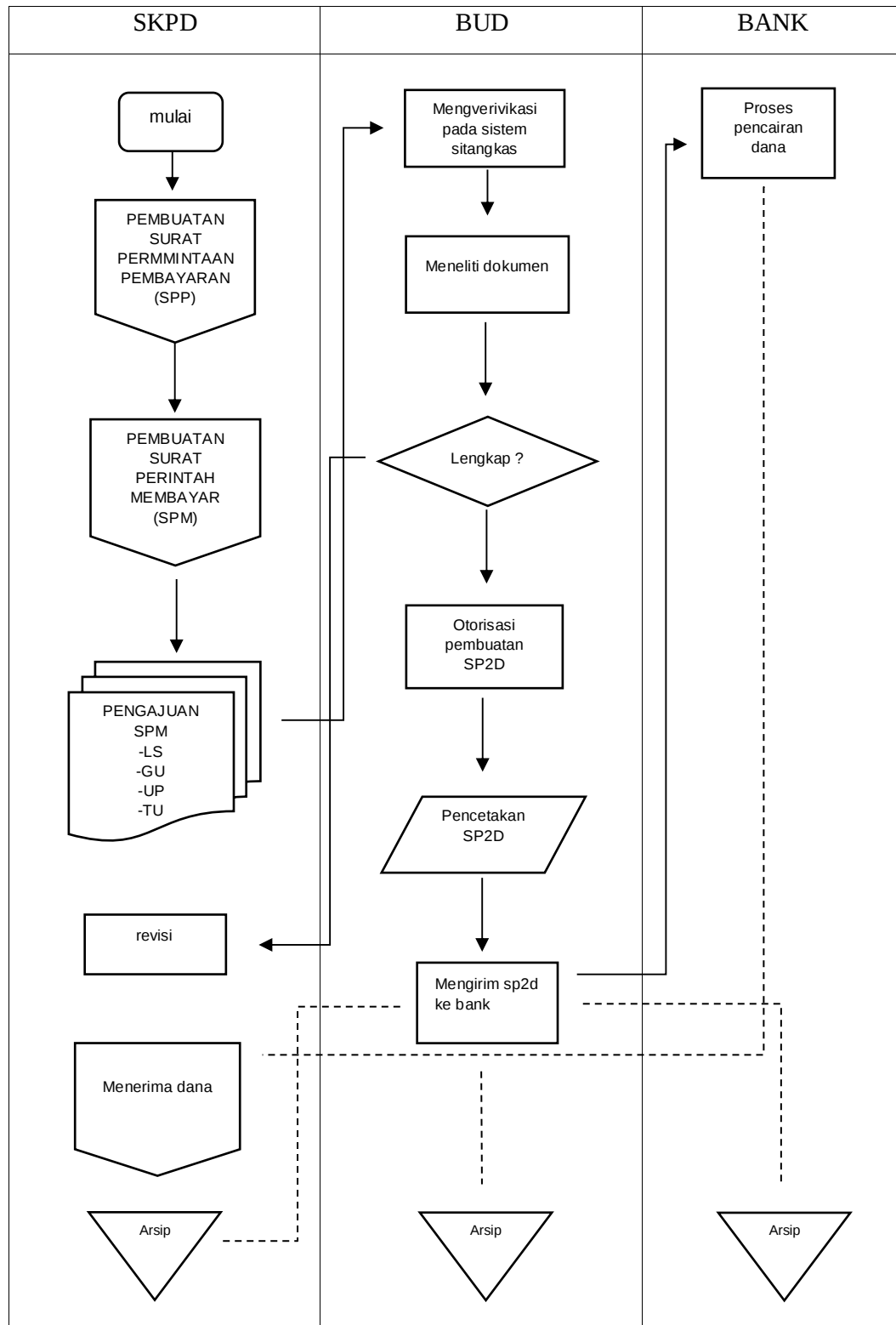
Nomor	Aktivitas	Pelaksana							Output	
		Petugas Locket	Peneliti Dokumen	Peneliti Pajak	Kabid Kasda	Kabid Belanja	Jabatan Fungsional	Bud/Kuasa Bud	Kelengkapan	Output
1	Menerima Dokumen Spm Dan Kelengkapan Membuat Tanda Tenma Dan Meneruskan Ke Peneliti Dokumen, Menginformasikan Dokumen Ke Skpd								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya	Dokumen Yang Sudah Tertera Tanda Terima
2	Manerima, Menellti Dokumen, Mengembalikan Bila Dokumen Tidak Lengkap, Meneruskan Ke Peneli Pajak Jika Dokumen Lengkap								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya Yang Sudah Diterima	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf Pada Petugas Locket
3	Memeriksa Kesesuaian Id Billing Dan Spm(Jenis,Masa Berlaku, Npwp>Nama Penyetor, Nominal) Paraf Jika Sesuai								Id Billing	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf
4	Memeriksa Catatan Peneliti Pajak, Jika Lengkap Diteruskan Dan Tidak Lengkap Dikembalikan								Lembar Penelitian	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf
5	Meneli Kembali Berkas (Lebih Khusus Pajak), Jika Salah Kembalikan, Jika Benar Paraf Dan Turuskan								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf Kasda
6	Monelih Kembali Berkas (Lebih Khusus Pembebanan Dan Kelengkapan Lampiran), Jika Salah Kembalikan,								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf Item Belanja

	Jika Benar Paraf Dan Teruskan									
7	Meneliti Kembali Berkas, Jika Salah Kembalikan, Jika Benar Paraf Dan Teruskan								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf
8	Meneliti Kembali Berkas, Jika Salah Kembalikan, Jika Benar Paraf Dan Teruskan								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya	Lembar Penelitian Yng Sudah Diparaf Bud/Kuasa Bud
9	Mencetak Surat Perintah Pencairan Dana								Dokumen Spm Dan Kelengkapanya Yang Sudah Diparaf Bud/Kuasa Bud	Sp2d Tercetak
10	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana, Mengarsip Dokumen, Meneruskan Ke Barik								Sp2d	Sp2d Ditandatangani



2. Flowchart Data Olahan

Gambar 3 Flowchart Data Olahan



Sumber penulis 2025

4.2.4 Prosedur Penerbitan SP2D Di BKAD Kota Manado

Prosedur penerbitan SP2D

- 1) BKAD Kota Manado menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD terkait.
- 2) Jika memenuhi kelengkapan, SPM diterima melalui sistem keuangan daerah (SITANGKAS)
- 3) Selanjutnya berkas diserahkan kepada Petugas peneliti BKAD untuk memverifikasi kelengkapan dokumen SPM, memeriksa kesesuaiannya dengan dokumen pendukung, memastikan dana tersedia dalam PAD, dan memeriksa kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Setelah verifikasi selesai, petugas memasukkan data SPM ke dalam sistem keuangan daerah (SITANGKAS).
- 5) Tahap berikutnya melibatkan proses persetujuan. Kepala sub-Bidang Perbendaharaan BKAD melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan, yang kemudian diikuti oleh persetujuan akhir dari Kepala BKAD untuk penerbitan SP2D.
- 6) Setelah disetujui, petugas menerbitkan SP2D melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk proses pencetakan.
- 7) Selanjutnya diserahkan kepada petugas untuk pemeriksaan Kembali kelengkapan pencetakan berkas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Setelah proses pemeriksaan, proses selanjutnya Kembali untuk meminta tanda tangan dari pejabat yang berwenang.
- 9) SP2D yang telah diterbitkan, kemudian didistribusikan. Salinan SP2D dikirimkan ke SKPD terkait sebagai bukti pencairan dana, sementara SP2D asli diserahkan ke bank yang ditunjuk untuk proses pencairan dana.
- 10) Petugas BKAD juga mencatat penerbitan SP2D dalam register SP2D dan buku kas umum.
- 11) Prosedur selesai

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan pengendalian internal di seluruh instansi pemerintah. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan dalam membangun suatu sistem pengendalian yang mampu meyakinkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan tercapai secara efektif dan efisien.

A. Unsur unsur sistem pengendalian internal pemerintah :

1. Lingkungan Pengendalian

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, penerapan unsur-unsur pengendalian internal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun. Setiap pegawai menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten di setiap aktivitas, disertai pengawasan ketat dari masing-masing unit untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pimpinan juga menanamkan budaya integritas serta etika kerja yang baik, dan bersikap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan. Di samping itu, struktur organisasi tersusun dengan jelas sehingga mendukung terlaksananya pengendalian internal secara lebih efektif.

2. Penilaian Risiko

Perubahan atau pembaruan peraturan seringkali berpotensi menimbulkan risiko baru yang berbeda dari sebelumnya. Namun, pemerintah senantiasa berupaya melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang dapat berdampak negatif terhadap instansi, khususnya terkait dengan pengelolaan pengeluaran kas. Implementasi unsur Penilaian Risiko dalam sistem pengendalian internal di Badan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja secara menyeluruh, telah sejalan dengan pengendalian internal sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

3. Kegiatan Pengendalian

Seluruh aspek dalam unsur kegiatan pengendalian telah diterapkan dengan baik. BKAD melaksanakan proses otorisasi atas setiap dokumen pengeluaran kas dan menetapkan pembagian tugas serta tanggung jawab yang terstruktur. Proses pengeluaran kas tidak dilaksanakan secara tunggal oleh satu individu, melainkan melibatkan sejumlah pihak yang berbeda guna menjamin keakuratan serta transparansi dalam pelaksanaannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Prosedur pengeluaran kas di BKAD Kota Manado telah didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang cukup memadai. Namun demikian, informasi terkait laporan keuangan belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Idealnya, informasi tersebut perlu dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau dan menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun aspek komunikasi internal telah berjalan cukup baik, aspek keterbukaan informasi kepada publik masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip transparansi pengelolaan keuangan

5. Pemantauan

Proses pemantauan pengendalian atas pengeluaran kas di BKAD Kota Manado telah berjalan secara optimal. Pemantauan ini melibatkan pihak eksternal dan internal pemerintah, seperti Inspektorat Daerah, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemantauan pengendalian di BKAD Kota Manado telah selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang berlaku

B. Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah :

Sistem pengendalian internal di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado telah diterapkan secara cukup efektif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengeluaran kas, terutama melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerapan ini mengacu pada lima unsur utama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek digitalisasi, publikasi informasi keuangan,. Dengan upaya tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Matriks Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pemerintah Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008

Tabel 4. 1 Matriks SPIP

Unsur SPIP	Indikator	Implementasi di BKAD Kota Manado	Temuan/Tantangan	Keterangan
1. Lingkungan Pengendalian	- Nilai integritas dan etika-Struktur organisasi-Komitmen pimpinan terhadap kompetensi SDM-Kebijakan SDM yang sehat	Telah diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas antara bidang dan staf serta prosedur kerja yang formal.	Masih terdapat keterbatasan jumlah SDM	Perlu penambahan dalam sumber daya manusia
2. Penilaian Risiko	- Identifikasi risiko operasional- Analisis risiko atas	Belum dilakukan secara formal dan menyeluruh. Risiko lebih banyak	Belum ada dokumen formal penilaian risiko terkait kesalahan input, lonjakan permintaan SP2D,	Disarankan untuk menyusun dokumen manajemen risiko dan SOP mitigasi.

	proses SP2D	direspons secara reaktif.	atau kegagalan sistem.	
3. Kegiatan Pengendalian	- Pemisahan fungsi-Otorisasi dokumen-Pemeriksaan dokumen sebelum SP2D diterbitkan	Proses verifikasi dan persetujuan SP2D telah dilakukan berlapis dan melalui sistem.	Terdapat potensi keterlambatan akibat prosedur yang belum terdigitalisasi sepenuhnya.	Sudah baik, namun perlu modernisasi dengan sistem digital yang lebih efisien.
4. Informasi dan Komunikasi	- Ketersediaan data akurat dan tepat waktu-Komunikasi internal antar bidang/unit - Keterbukaan informasi ke publik	Sudah menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SITANGKAS) dan SIPD untuk mendukung proses pengeluaran kas dan komunikasi internal.	Informasi laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi.	Meningkatkan transparansi dengan rutin mempublikasikan ringkasan laporan keuangan melalui media resmi (website, publikasi cetak, dll).
5. Pemantauan (Monitoring)	- Monitoring berkala-Tindak lanjut hasil audit-Evaluasi efektivitas sistem	Monitoring dilakukan oleh pimpinan bidang, serta audit berkala oleh Inspektorat dan BPK.	Pemantauan sudah berjalan baik meskipun sebagian masih dilakukan secara manual.	Proses pemantauan dinilai telah sesuai dengan prinsip pengendalian internal dan mendukung akuntabilitas pengeluaran kas.

Sumber penulis 2025

4.3.2 Analisis Temuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Serta Bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran kas di BKAD Kota Manado. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dan pimpinan, ditemukan bahwa semua prosedur pengeluaran kas sudah dilakukan melalui sistem dan terkomputerisasi yakni SITANGKAS dan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam mendukung pengelolaan data penerbitan SP2D secara cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Temuan penting menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas sistem Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta pemahaman setiap SKPD yang kurang memadai kurangnya sistem penginputan yang belum sepenuhnya optimal, melonjaknya permintaan SP2D pada hari tertentu, dapat menjadi halangan halangan dalam proses penerbitan SP2D. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko *human error* serta ketergantungan berlebihan terhadap petugas teknis, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi sistem secara keseluruhan.

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat lunak, melainkan juga oleh kesiapan dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikannya secara mandiri dan konsisten.

kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur lingkungan pengendalian dan penilaian risiko serta komunikasi dan informasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini menandakan perlunya penguatan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif, serta desain antarmuka sistem yang lebih sederhana dan ramah pengguna serta keterbukaan informasi ke publik.

Temuan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, yang merupakan tantangan umum dalam implementasi transformasi digital di sektor publik. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi akuntansi yang diterapkan di instansi pemerintahan, khususnya di BKAD Kota Manado, perlu mengedepankan prinsip inklusivitas—yakni tidak hanya memperhatikan kemutakhiran teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas pengguna di lapangan. meskipun secara teknis penerapan sistem informasi akuntansi di BKAD Kota Manado telah menunjang proses pengeluaran kas secara sistemik, masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan, khususnya dalam aspek penguatan kapasitas SDM. Upaya seperti peningkatan intensitas pelatihan, penyempurnaan komunikasi lintas unit kerja, serta penyesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna menjadi strategi penting guna mencapai tujuan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh

4.3.3 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis,

1. Implikasi Teoritis

hasil penelitian ini turut memperdalam pemahaman tentang bagaimana penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat berjalan secara efektif. Temuan penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem pengendalian internal tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan atau struktur organisasi yang telah ditetapkan secara formal, tetapi dipengaruhi oleh tingkat kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan dukungan teknologi informasi yang memadai, serta konsistensi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang membahas pentingnya integrasi antara aspek struktural dan fungsional dalam pengendalian internal sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam proses pengeluaran kas memerlukan dukungan penuh dari unsur lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang terstruktur.

2. Implikasi Praktis

penelitian ini memberikan masukan dalam memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme pengeluaran kas. Meskipun penerapan sistem informasi seperti SITANGKAS dan SIPD telah mendukung digitalisasi proses, masih terdapat hambatan yang bersumber pada keterbatasan SDM, kompleksitas teknis sistem, serta kurangnya integrasi antarsistem. Oleh karena itu, implikasi praktis dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting:

- 1) Penguatan kapasitas SDM, terutama dalam penguasaan sistem informasi dan pemahaman terhadap prosedur pengeluaran kas, melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan
- 2) Revisi dan penyempurnaan SOP (Standar Operasional Prosedur) agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan operasional yang dinamis
- 3) Optimalisasi sistem informasi keuangan, baik dalam aspek user interface, interoperabilitas sistem daerah dan nasional, maupun keandalan infrastruktur teknologi yang digunakan
- 4) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi pengelolaan keuangan daerah dan dapat melakukan kontrol sosial secara konstruktif.

hasil penelitian ini tidak hanya relevan dalam memperkuat implementasi SPIP di lingkungan BKAD, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan pengeluaran kas secara digital dan terintegrasi. Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian serta hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di BKAD Kota Manado telah diterapkan sesuai dengan unsur-unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Unsur tersebut meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Secara umum, pengeluaran kas melalui proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan dengan prosedur yang tertib dan didukung pembagian tugas yang jelas, pemisahan fungsi, otorisasi berlapis, serta penggunaan sistem informasi seperti SITANGKAS dan SIPD.
- 2) sistem pengendalian internal di BKAD Kota Manado dinilai sudah cukup efektif dalam menjaga akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan pengeluaran kas. Pengawasan internal dan audit eksternal, penggunaan sistem informasi, serta mekanisme verifikasi dokumen berlapis telah membantu memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Meski demikian, transparansi masih dapat diperkuat melalui langkah-langkah seperti, publikasi rutin ringkasan laporan keuangan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, berikut ini sejumlah saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait:

- 1) Disarankan agar BKAD Kota Manado menambah jumlah sumber daya manusia (SDM), khususnya pada bidang perbendaharaan yang menangani verifikasi dokumen dan penerbitan SP2D. Penambahan SDM ini penting untuk mengurangi beban kerja yang saat ini cukup tinggi, mempercepat proses layanan, serta meminimalkan potensi kesalahan akibat keterbatasan tenaga kerja. Dengan jumlah SDM yang memadai, diharapkan efektivitas dan akurasi sistem pengendalian internal dapat semakin meningkat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik..
- 2) Perlu dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar lebih fleksibel, responsif terhadap dinamika operasional, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
- 3) Optimalisasi sistem teknologi informasi harus diarahkan pada pengembangan antarmuka (interface) yang lebih ramah pengguna (user-friendly), termasuk peningkatan kapasitas server dan pemutakhiran perangkat lunak agar sinkronisasi dengan sistem nasional dapat berjalan optimal.
- 4) BKAD disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui publikasi rutin laporan keuangan dan kinerja secara daring, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, V., Tinangon, J., & Maradesa, D. (2023). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 132–143. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50875>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Daerah., P. M. D. N. (Permendagri) N. 13 T. 2006 tentang P. P. K. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Darmawan, A. Z., Islam, U., Sumatera, N., Harmain, H., Islam, U., Sumatera, N., Syahriza, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Peranan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Mendukung Pengendalian Internal Kas Pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara Alyaa Zafira Darmawan Hendra Harmain Rahmi Syahriza terjamin keamanannya , informasi tidak t.*
- Manikome, E. F., Budiarso, N. S., & Afandi, D. (2025). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. 3(1), 24–39. <https://doi.org/10.58784/ramp.244>
- Rachmawati, D. W., & Ardini, L. (2023). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Pengeluaran Kas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(11), 1–15.
- Rajab, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(Bpkad)Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(3), 390–401.
- Sabu, F., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 311–322. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.49298>
- Indonesia , 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah Pusat : Jakarta
- Indonesia. 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Pemerintah Pusat : Jakarta

- Indonesia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Seperti Penetapan Kebijakan APBD, Pengelolaan Barang Daerah, Dan Penetapan Bendahara Penerimaan. Pemerintah Pusat : Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat : Jakarta
- Indonesia, Peraturan Wali Kota Manado Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado
- Kamila Luthfia Yahya, Iswary Amalia, & Lies Nurhaini. (2023). Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 26–36. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i4.1095>
- Nugraheni, R., Ilmu, I., Bhakti, K., & Timur, J. (2024). *Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan Evaluation of the Implementation of Minimum Service Standards (MSS) at the Kediri City Health Center in the Southern Region Partisipan dan Desain Studi adalah .* 16(3), 141–150.
- Rachmawati, D. W., & Ardini, L. (2023). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Pengeluaran Kas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(11), 1–15.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pentingnya sistem pengendalian internal dalam pengeluaran kas di BKAD?

Sistem pengendalian internal sangat penting untuk memastikan pengeluaran kas dilakukan sesuai prosedur, akurat, aman, dan akuntabel. Pengendalian internal juga membantu mencegah potensi kecurangan, kesalahan, serta memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya.

- 2) Bagaimana penerapan unsur-unsur pengendalian internal di BKAD saat ini?
Secara umum, unsur-unsur pengendalian internal seperti pemisahan fungsi, otorisasi dokumen, serta pemeriksaan berlapis sudah diterapkan dengan baik. Proses pengeluaran kas di BKAD sudah menggunakan sistem SITANGKAS dan SIPD yang mendukung akurasi dan kecepatan, serta memastikan dokumen terdokumentasi dengan baik.

- 3) Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerbitan SP2D?

Tantangan terbesar yaitu melonjaknya permintaan SP2D pada waktu tertentu, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidaksesuaian data atau dokumen dari SKPD. Selain itu, risiko kesalahan input juga masih menjadi perhatian kami.

- 4) Bagaimana BKAD memastikan bahwa setiap pengeluaran kas dapat dipertanggungjawabkan?

Semua dokumen pengeluaran kas melalui proses verifikasi yang ketat dan harus mendapat otorisasi dari pejabat berwenang. Kami juga diaudit secara rutin oleh Inspektorat Daerah maupun BPK, dan melakukan pemantauan internal.

- 5) Apakah sistem pengendalian internal yang ada sudah cukup efektif?

Secara umum sudah cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan di beberapa aspek seperti penilaian risiko yang belum didokumentasikan secara formal dan keterbukaan informasi publik.

Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 034/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Juan Hulio Eltberph Senduk
NIM	:	21043004
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di badan keuangan dan aset daerah kota manado
Pembimbing Utama	:	Merry L. Sael, SE.,MAP
Persentase	:	22%
Tanggal Pengecekan	:	3 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado, 3 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

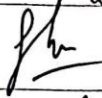
**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

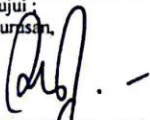
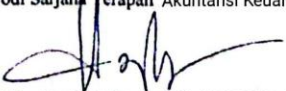
KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado

Nama Mahasiswa : Juan Hudio Eltberph Senduk NIM. 21 043 004

Nama Pembimbing : Merry L. Sael, SE.,MAP

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	16 Juni 2025	Kesepakatan selesai pembimbingan	
2	16 Juni 2025	Profil perusahaan, Struktur, aktifitas	
3	17 Juni 2025	Hasil penelitian Deskripsi sistem semi perusahaan	
4	18 Juni 2025	Perjelasan per Bagian, Dokumen, Flowchart & perjelasan	
5	20 Juni 2025	Pembahasan Pengendalian internal dan matriks	
6	23 Juni 2025	Matriks Pengendalian internal	
7	24 Juni 2025	Kesimpulan dan saran serta abstrak	
8	25 Juni 2025	Siap diuji	
9			
10			
11			
12			

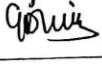
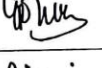
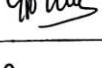
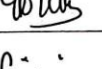
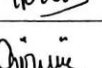
Menyetujui: Plt. Ketua Jurusan,  Ivoletti M. Walukow, SE.,MSi NIP. 19641211990032001	Divalidasi oleh; Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS NIP. 197002051998022000
--	---

Lampiran 4 Konsultasi Dosen Pembimbing 2

Lembar Pembimbing 2

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado
 Nama Mahasiswa : Juan Hudio Eltberph Senduk NIM. 21 043 004
 Nama Pembimbing : Grace Ropa, SE.,MSi

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	16/6-2025	Sistematika Penulisan	
2	17/6-2025	Penjelasan tentang apa yang dihadapi BKAD & berikan contoh	
3	18/6-2025	Contoh Permintaan atau pengusulan gaji TPP, LAT, & dll. dari SKPD	
4	19/6-2025	Berikan Penjelasan tentang dokumen yang terkait.	
5	20/6-2025	Pembahasan Pengendalian Internal	
6	23/6-2025	Sistematika temuan masalah	
7	24/6-2025	flowchart dan Penjelasananya	
8	25/6-2025	Kesimpulan dan saran serta abstrak	
9			
10			
11			
12			

Menyetujui ; Plt. Ketua Jurusan  Ivoletti M. Walukow, SE.,MSi NIP. 196412111990032001	Divalidasi oleh; Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS NIP. 197002051998022000
---	---